

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Definisi Politik

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, *polis* (kata benda) yang berarti kota atau sebuah komunitas. Istilah lain dalam bahasa Yunani ialah *politeia* (kata benda) yang berarti warga negara, negara, kesejahteraan atau *way of life*. Jadi, politik pada mulanya berarti suatu masyarakat yang berdiam di suatu kota.<sup>4</sup>

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan).<sup>5</sup> Definisi lain tentang istilah politik terdapat dalam Kamus Istilah Politik Kontemporer. Ada banyak uraian definisi politik dalam kamus tersebut, antara lain: (1) Usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kehidupan bersama; (2) Segala hal yang berkaitan dengan negara dan pemerintah; (3) Segala kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan; (4) Segala kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik atau masyarakat umum; (5) Suatu konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan dari sumber-sumber yang penting; (6) Kegiatan yang berkaitan dengan masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana?; (7) Kegiatan manusia yang berkenaan

---

<sup>4</sup> Gunce Lugo, *Manifesto Politik Yesus (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009)* hlm. 41-42

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)* hlm. 886

dengan pengambilan dan pelaksanaan keputusan-keputusan. Tidak ada satu ungkapan yang dapat mengungkap sejumlah makna yang terkandung dalam kata politik ini. "Politik" mengandung makna kegiatan atau proses, sebaliknya "sistem politik" secara tidak langsung menunjukkan eksistensi tatanan atau pola-pola hubungan. Dalam lingkungan praktis, politik disebut sebagai "seni untuk melakukan sesuatu yang mungkin", "seni memerintah" dan studi tentang "siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana?". Politik biasanya disamakan dengan penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan dan persaingan di antara para individu dan kelompok atas alokasi ganjaran atau "nilai-nilai" di dalam masyarakat. Politik juga mencakup proses pengendalian sosial, termasuk lingkungan dan pencapaian tujuan-tujuan bersama. Berbagai wajah politik dengan gampang terlihat pada setiap kelompok sosial seperti pengambilan keputusan, pencarian kekuasaan, pengalokasian nilai, cakupan tujuan, pengendalian sosial, pencaharian kekuasaan, persaingan kepentingan dan kegiatan-kegiatan yang menggunakan pengaruh. Tetapi, dalam kebanyakan percakapan politik lebih mengacu pada kebijakan-kebijakan umum dan alokasi daripada proses intern organisasi-organisasi swasta.<sup>6</sup>

Secara teori, definisi politik terus berkembang sesuai dengan prespektif dan kajian pakar, misalnya: politik dipresepsi sebagai kekuasaan negara (*clasic theories*), perilaku elit politik (*behavioralis*), sistem (*system theories*), budaya (*culture theories*), pembangunan (*development theories*), konflik antar kelas dalam masyarakat (*conflict theories*), ekonomi (*economy politic*),

---

<sup>6</sup> Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer (Yogyakarta: Cakrawala, 2009)* hlm. 257-258.

kelompok termarginal (*post modern*) dan seterusnya.<sup>7</sup> Dalam teori politik modern, politik diasumsikan sebagai kekuasaan negara, yang diwakili oleh partai politik untuk mewakili aspirasi masyarakat, khususnya dalam konteks negara demokrasi. Dengan demikian, dalam negara demokratis, politik didefinisikan sebagai kekuasaan menduduki parlemen atau pemerintahan. Dalam hal ini politik diidentikkan dengan kekuasaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan mampu berpolitik dalam negara demokratis jika ia mampu menduduki parlemen atau pemerintahan.

Ramlan Surbakti, seorang pakar politik, seperti dikutip dalam buku *Politik Yesus bagi Indonesia*, mengungkapkan pengertian politik dalam sistim masyarakat maupun pemerintahan. Ia membagi pengertian politik menjadi beberapa prespektif, diantaranya:

1. Prespektif klasik yang didasarkan pada pemahaman Aristoteles sebagai penggagas teori politik pertama. Menurut filsuf ini, politik merupakan suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Atas dasar ini, Aristoteles menganggap manusia sebagai makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia untuk hidup di dalam polis.
2. Prespektif kelembagaan yang didasarkan pada pandangan Max Weber, dimana sistim politik dikuasai oleh negara. Artinya negara yang terdiri dari komunitas tertentu melakukan monopoli yang sah dalam suatu wilayah tertentu.
3. Prespektif kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan politik golongan/pribadi tertentu dalam mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhinya.
4. Prespektif fungsionalisme yang didasarkan pada aspirasi para elit politik yang memandang politik dari kacamata fungsional, bahwa politik merupakan sarana untuk mendapatkan apa yang dikejar oleh manusia.

---

<sup>7</sup> Ibid.

5. Prespektif konflik. Maksudnya sumber lahirnya politik berawal dari konflik yang terjadi melalui perbedaan pendapat, perdebatan, dan persaingan. Dalam konflik tersebut setiap pihak berupaya untuk mempertahankan nilai-nilai yang diinginkannya, dan untuk itu, mereka mencari pihak-pihak yang lain untuk memperoleh dukungan guna mencapai tujuan politiknya masing-masing.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh Surbakti ini ruang lingkup pemahaman politik menjadi semakin luas, karena sesungguhnya tidak ada sendi kehidupan manusia yang terlepas dari politik. Surbakti membagi pemahamannya tentang politik berdasarkan sudut pandang para tokoh yang menginspirasi.

Politik adalah “kebersamaan dan ketersalingan dalam kebhinekaan”. Kebersamaan dalam perbedaan itu terjadi dalam kebebasan. Kebebasan dimaksud adalah kebebasan dari segala bentuk keharusan dalam kerja dan produksi. Kerja merupakan jawaban manusia atas tuntutan hidup.<sup>9</sup> Politik dipandang sebagai sebuah kekayaan yang mampu mendorong terwujudnya kebersamaan. Kebhinekaan merupakan sebagai suatu kekayaan untuk membangun kehidupan bersama. Oleh karena itu semestinya setiap orang hidup saling berdampingan dalam kebhinekaannya tanpa ada kekacauan. Semua pihak bertanggung jawab secara aktif berpartisipasi membina kehidupan bersama yang harmonis.

Pada dasarnya politik merupakan suatu proses perundingan publik tentang bagaimana hidup bersama dalam suatu masyarakat, yang diatur dalam suatu sistem bernegara. Bertolak dari definisi tersebut semestinya pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Parel T. J. dan Maidiantius T. J., hlm. 18-19

<sup>9</sup> Otto Gusti Madung, *Politik: Antara Legalitas dan Moralitas* (Maukere: Ledalero, 2009) hlm xi

pemerintahan dalam negara demokratis mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Politik tidak hanya sekedar berurusan dengan konstruksi institusi dan tatanan hidup bersama yang normatif.

## **B. Sejarah Politik dalam Alkitab**

### **1. Sejarah Politik dalam Perjanjian Lama (PL)**

Ketika berbicara mengenai politik dalam PL, maka pada hakikatnya berbicara mengenai kekuasaan. Namun, kekuasaan bukanlah konsep tunggal, ia memiliki banyak arti. Dalam PL, pada umumnya kekuasaan dilihat sebagai kemungkinan untuk mempengaruhi atau memaksakan keinginan kepada orang lain tanpa meminta suatu persetujuan bahkan kekuasaan itu dapat menggunakan kekuatan fisik atau kekerasan. Kekuasaan mempunyai dua muatan, yaitu kekuatan (*power*) dan otoritas (*authority*). Dalam praksis keduanya selalu ada berasama dan selalu bersifat menekan agar orang lain bisa mengikuti kehendak penguasa. Dalam teologi politik PL, kekuasaan dipahami pertama-pertama sebagai milik Allah. Hanya Allah yang berkuasa atas hidup manusia karena itu Allah disapa sebagai Allah Mahakuasa. Manusia tidak pernah berkuasa atas sesama. Kalaupun manusia berkuasa, kekuasaan itu merupakan kekuasaan yang bersifat partisipatif pada kekuasaan Allah.

Fokus kekuasaan yang akan dibahas mengenai teologi politik PL dalam skripsi ini adalah mengenai kekuasaan politik yang muncul di dalam kerajaan atau negara sebagai sebuah aktivitas bersama dalam komunitas Israel sebagai masyarakat sosial. Sejarah Israel mencatat bahwa



kerajaan terbentuk karena adanya pengalaman penderitaan bersama, yakni dijajah oleh Mesir. Pengalaman penderitaan melahirkan solidaritas kelompok yang cukup kuat untuk membentuk sebuah kebersamaan hidup di mana setiap orang hidup dalam kemerdekaan dan kesetaraan. Kekuasaan sejati hanya ada pada Allah. Setiap orang yang berkuasa (imam, nabi dan raja) hanya berpartisipasi dalam kekuasaan Allah. Bentuk legitimasi dari partisipasi itu adalah kekuasaan untuk menggembalakan umat. Kekuasaan itu harus menghantar umat untuk hidup dalam kesejahteraan. Bentuk nyata dari kekuasaan sejati adalah praktek keadilan dimana orang harus hidup dalam damai dan tidak ditindas. Orang harus hidup dalam kebebasan, hak dan kewajibannya harus diperhatikan. Orang miskin, janda dan yatim piatu harus dibela. Orang Israel sadar bahwa pembangunan negara agama hanya sebuah ilusi. Tidak mungkin ada negara agama karena kehendak Allah yang Mahakuasa sulit diterjemahkan ke dalam sebuah pemerintahan. Allah terlalu besar dan suci sehingga sulit menerjemahkan keagungan-Nya itu ke dalam pemerintahan manusiawi yang kecil dan egois. Kekuasaan manusia cenderung untuk menindas dan memperdayai orang lain.<sup>10</sup>

Secara implisit, sejak zaman PL, Tuhan sudah menetapkan peran politik kepada umat-Nya untuk terlibat dalam penataan kota. Misalnya dalam Yeremia 29:7 mengatakan: "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan,

---

<sup>10</sup> Matius Mali CSsR, *Konsep Berpolitik Orang Kristiani* (Yogyakarta: Kanisius, 2013) hlm. 1-50.

sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu.”<sup>11</sup> Sesungguhnya politik dalam prespektif Alkitab selalu memiliki tujuan akhir, yaitu mendatangkan kesejahteraan, ketenangan, ketentraman bagi seluruh umat manusia. Pandangan PL tentang politik berfokus pada kekuasaan, akan tetapi kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan Allah. Setiap orang yang berkuasa (iman, nabi dan raja) hanya berpartisipasi dalam kekuasaan Allah tersebut.

Keterlibatan Allah dalam politik sebenarnya sudah nampak sejak penciptaan ketika Allah mengatur alam semesta seperti yang tercatat dalam Kejadian 1 dan 2. Juga dalam Keluaran 12:26 dikatakan bahwa Tuhan adalah pembuat keputusan mutlak dalam pemerintahan Teokrasi. Contoh lain dari tindakan politik Allah dalam kehidupan umat Israel ialah ketika Allah memberikan Hukum Taurat melalui Musa untuk mengatur bangsa Israel (Kel. 20:1-17) agar kehidupan mereka selaras dengan maksud atau kepentingan Tuhan.<sup>12</sup>

Jadi, sejak awal Allah telah mengajarkan politik dalam kehidupan manusia melalui perintah yang diberikan-Nya. Allah mengerjakan segala sesuatu sejak penciptaan untuk menyediakan kesejahteraan bagi manusia dan ciptaan lainnya. Tujuan Allah ialah keharmonisan hidup semua ciptaan. Tindakan Tuhan melalui penghakiman dan hukuman dapat diartikan sebagai alat politis-Nya untuk menciptakan pertobatan, kesucian dan menata kembali pemerintahan atas umat-Nya, yang harus dibangun

---

<sup>11</sup> Parel T. J. dan Maidiantius T. J., hlm. 21

<sup>12</sup> Ibid hlm. 24-25.

dengan nilai-nilai etika moral kerajaan Tuhan. Tuhan dapat disebut sebagai politisi karena Ia sendiri telah terlibat dalam mengatur kehidupan umat-Nya, sistem pemerintahan mereka, hingga nasib dunia ini pun ada dalam aturan atau administrasi Tuhan.

## **2. Sejarah Politik dalam Perjanjian Baru (PB)**

Titik sentral pewartaan PB ada pada pribadi Yesus Kristus. Diyakini bahwa seluruh peristiwa hidup dari bangsa Israel sejak semula dan penyusunan Alkitab (PL) menuju kepada inkarnasi, yaitu Firman menjadi manusia (Yoh. 1:14).<sup>13</sup> Tokoh politik utama dalam PB adalah Yesus itu sendiri. Sejak kecil hingga dewasa, Yesus hidup dalam sistem politik Yahudi. Misalnya, Yesus harus mengikuti tradisi sunat sesuai dengan ketentuan agama Yahudi (Lukas 2:21). Kondisi politik-religius ini mengatur kehidupan Yesus. Setelah Yesus berumur 12 tahun, Ia muncul di Bait Allah dan para Ahli Taurat mendapati bahwa Ia adalah anak yang sangat cerdas (Lukas 2:47). Hal ini juga menunjukkan bahwa kehidupan Yesus sungguh disiplin dalam soal pendidikan dan bersedia menaati perintah Taurat serta hidup dalam aturan orangtua-Nya. Ketika Ia menjadi dewasa dan memasuki dunia pelayanan, Yesus taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa-Nya. Semua itu mengaitkan diri-Nya dengan aturan politis. Lebih jelasnya ketika Ia memberikan ajaran mengenai pemerintah dalam Matius 20:25-28. Pengajaran ini merupakan manifesto politik Yesus Kristus, yang membuktikan diri-Nya sebagai Tokoh sekaligus Pengamat

---

<sup>13</sup> Matius Mali CSsR, hlm. 59.



Politik yang memantau perkembangan politik kerajaan Romawi pada waktu itu. Ia aktif berpolitik, tetapi tidak berpolitik secara praktis, ia berpolitik secara etis. Politik dalam pandangan Yesus adalah sebagai dunia pelayanan, politik harus mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, dan para elit politik harus menjadi garam dan terang bagi dunia.<sup>14</sup>

Jadi, inti dari manifesto politik Yesus adalah setiap orang percaya harus menjadi garam dan terang dunia. Orang percaya harus menerangi setiap tindakan yang tidak mensejahterakan. Manifesto politik Yesus ialah membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan peradaban, agar terwujud kesejahteraan dan kesetaraan rakyat secara materi, jasmani dan rohani (adil dan makmur)

### **C. Partisipasi Politik dalam Konteks Negara Demokratis**

Kegiatan seseorang, kelompok atau organisasi untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, membangun relasi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya. Partisipasi mempunyai kesamaan dengan tindakan politik, seperti ikut pemilu, mempengaruhi pengambilan keputusan atau ikut partai.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Parel T. J. dan Maidiantius T. J., hlm. 36-43.

<sup>15</sup> Akbar Kaelola, hlm. 22.

Masyarakat yang secara sadar berpartisipasi telah turut mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah tidak bekerja sendiri, namun bersama dengan masyarakat membangun kehidupan bernegara. Tanggung jawab membangun negara adalah tugas semua masyarakat sebagai warga negara dan untuk memudahkannya maka ditentukanlah pihak-pihak yang menjadi pengatur, dalam hal ini pemerintah. Pemerintah mengemban amanah rakyat yang memilih mereka, karena itu pemerintah seharusnya mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dalam setiap kebijakannya. Tugas masyarakat adalah berpartisipasi dalam berbagai bentuk tindakan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Miriam Budiardjo mengutip pendapat Herbert McClosky demikian:

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).<sup>16</sup>

Berdasarkan pernyataan ini, jelaslah bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk menyatakan tindakan yang di dalamnya memberi dampak bagi pembentukan kebijakan umum. Tanpa tindakan masyarakat, pemerintah akan kesulitan menentukan kebijakan-kebijakan seperti dalam rangka pembangunan. Dalam hal ini, partisipasi politik masyarakat hanya mungkin terwujud jika ada rasa memiliki terhadap negara. Rasa memiliki terhadap

---

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008) Hal. 367

negara akan mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif menyatakan partisipasi politiknya.

Sementara itu, Samuel P. Huntington, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo mengatakan:

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent legal or illegal, effective or ineffective*).<sup>17</sup>

Partisipasi dapat dinyatakan secara perseorangan, ataupun berkelompok, terorganisir atau spontan bereaksi ketika misalnya ada ketimpangan sosial, secara mantap ataupun sporadis sesuai kondisi, secara damai atau dengan kekerasan karena sudah tidak terkontrol secara emosi, secara legal berdasarkan prosedur yang ada ataupun secara ilegal dan banyak cara lain yang dipakai menyatakan partisipasi. Partisipasi di negara berkembang akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, agama, dan sebagainya. Negara demokratis menerima kebebasan memilih, tanpa syarat tambahan dan kualitas demokrasi akan lebih baik bila partisipasi dalam pemilu menjadi besar.<sup>18</sup>

Konsep partisipasi politik di negara demokratis bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan

---

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, hlm. 368

<sup>18</sup> K. Bertens, *Perspektif Etika Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2009) hlm. 18

bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Setiap masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara dalam pemilu atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan pemerintah untuk membuat keputusan yang mengikat. Hal ini berarti masyarakat meyakini bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik. Jika kedaulatan ada di tangan rakyat, maka semestinya rakyat berhak menuntut para wakil mereka jika dalam pelaksanaan demokrasi wakil rakyat tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi negara dan terlebih lagi merugikan dan menyengsarakan rakyat.

Tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti dan memahami masalah politik serta ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi politik juga dapat menjadi ukuran keabsahan legitimasi pemerintah. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat diukur dari tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah merupakan suatu tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Selain itu, pemerintah juga

akan kesulitan melihat kebutuhan masyarakat jika partisipasi politik rendah.

Partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

Miriam Budiardjo mengatakan demikian:

Suatu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah warga negara yang berhak memilih.<sup>19</sup>

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu tolak ukur tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam negara demokratis. Hal tersebut dapat dihitung dari perbandingan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dengan yang tidak menggunakan haknya dalam hal ini dikategorikan golput.

Cara lain berpartisipasi ialah melalui keanggotaan partai politik (parpol). Parpol merupakan medan yang memungkinkan terjadinya partisipasi politik rakyat, pengolahan aspirasi rakyat, berlangsungnya kaderisasi kepemimpinan, penggodokan manajemen pemerintahan dan rekrutmen *politbiro* (bagian dari partai komunis yang mengurus dan memutuskan masalah politik) berbakat untuk menduduki sejumlah jabatan publik pemerintahan. Kisah sukses sebuah negara demokrasi sangat bergantung pada kemantapan keberadaan parpol yang memenuhi kancah kehidupan politiknya.<sup>20</sup> Parpol sejatinya menolong masyarakat untuk menyatakan partisipasinya secara khusus dalam pemilihan. Namun kehadiran parpol tidak

---

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, hlm. 375

<sup>20</sup> Max Regus. *Republik Sialan: Memburu Kejernihan di Tengah Belantara Kehidupan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2003) hlm. 46

seindah idealisme negara demokrasi yang sudah begitu lama mengental dalam impian masyarakat Indonesia. Parpol tidak dapat mempertanggungjawabkan tugas sucinya sebagai lokomotif demokratisasi, seperti yang sering mereka propagandakan selama pemilu. Para elit parpol saat berkampanye menjanjikan akan menyuarakan kepentingan masyarakat, namun tidak semua mereka penuhi. Malahan, sejumlah parpol di negara kita, secara drastis, sedang menggerus partisipasi politik rakyat Indonesia. Kasarnya, parpol seringkali hanya sempat merepotkan, dengan seribu satu macam manuver politik yang membingungkan dan mencelakakan bangsa Indonesia.

Akibat yang ditimbulkan dari perilaku para elit parpol tersebut berujung pada apatisme politik masyarakat. Masyarakat bersifat masa bodoh terhadap berbagai bentuk politik yang sedang berlangsung. Sikap apatis masyarakat ini mendorong rendahnya partisipasi dalam berbagai aspek politik, misalnya keterlibatan dalam kegiatan pemilihan. Masyarakat beranggapan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin (misalnya bupati) keadaan tidak akan berubah, akan tetap seperti biasanya.

Kedewasaan politik menentukan kualitas partisipasi politik. Kedewasaan politik menciptakan kemungkinan terjadinya komunikasi yang membuka sumbat komunikasi politik, melalui perbincangan, lobi-lobi politik yang nalar sehingga menghormati argumentasi, penuh logika dan retorika yang mencerminkan romantisme politik dalam bingkai moralitas. Etis politik yang demikian menempatkan rakyat dalam posisi diberdayakan, dijadikan patner partisipan – ketika rakyat telah tahu mengenai seluk beluk kehidupan

berpolitik, mengetahui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan aktor-aktor politik dan memberikan umpan balik dalam proses politik yang sedang berlangsung.<sup>21</sup>

Pada hakikatnya, partisipasi politik masyarakat dalam konteks negara demokratis adalah keseluruhan hidup berpolitik untuk memperjuangkan kehidupan bersama sebagai sebuah negara. Setiap hal yang dikerjakan semestinya menjadikan negara semakin maju menjadi lebih baik. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab partisipasi yang sama.

#### **D. Partisipasi Politik Warga Gereja**

Gereja adalah tubuh Kristus dan umat Allah dalam dunia ini. Karena itu, interaksi dengan dunia sekitarnya, termasuk dunia politik adalah suatu keharusan teologis sendiri. Artinya, interaksi itu bukan karena suka atau tidak suka melainkan karena hal itu sangat terkait dengan iman Kristen itu sendiri kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah politis, Allah yang berurusan dengan masalah-masalah politis. Karena itu, kalau gereja ingin mengabdikan kepada Allah dalam Yesus Kristus, maka gereja juga harus bersifat politis.<sup>22</sup> Gereja mesti menyatakan sikapnya terhadap persoalan-persoalan politis yang terjadi di sekitarnya, tidak hanya memusatkan diri pada persoalan spiritual saja. Politik juga adalah bagian pelayanan gereja yang mesti diberi perhatian.

---

<sup>21</sup> Paulus Mujiran, *Kerikil-kerikil Tajam di Masa Transisi: Serpihan Esai Pendidikan, Agama, Politik dan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hlm. 334

<sup>22</sup> Julianus Mojau, hlm. 83

Gereja adalah suatu masyarakat dalam masyarakat, suatu komunitas dalam suatu komunitas, suatu bangsa dalam suatu bangsa, suatu lembaga yang diperintah secara ilahi dalam lembaga-lembaga yang diperintah secara manusia. Gereja adalah sekolah rohani tempat umat diperlengkapi supaya dapat melaksanakan tujuan-tujuan yang telah Allah berikan kepada gereja.<sup>23</sup> Salah satu yang perlu diajarkan kepada warga gereja adalah pendidikan politik. Dengan demikian ketika gereja telah menjadi sekolah rohani untuk memperlengkapi warganya, salah satunya melalui pendidikan politik, maka warganya akan berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Bahwa gereja dan umat Kristen melibatkan diri di bidang politik adalah sebuah persoalan yang cukup rumit. Memang pernah politik dianggap tabu di kalangan gereja-gereja dan umat Kristen Indonesia. Kesalahan peitisme yang cenderung mengarahkan mata “ke atas” sehingga terkesan bahwa “dunia” dilupakan, membuat politik tidak memperoleh tempat yang semestinya di dalam kehidupan beriman, gereja dan umat Kristen Indonesia. Politik tidak dipahami secara sempit hanya sekadar membentuk partai politik, atau melibatkan diri dalam kegiatan pemilu. Sebaliknya, politik secara erat dikaitkan dengan ideologi, penegakan hukum dan keadilan, bahkan harkat dan martabat manusia. Masalah mendapatkan kekuasaan bukanlah tujuan di dalam dirinya, melainkan untuk melayani sesuatu yang lebih tinggi karena orang

---

<sup>23</sup> Frank Damazio, *Memimpin dengan Roh: Prinsip-prinsip Kepemimpinan yang Ilahi*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2008) hlm. 21-25



Kristen ditempatkan Tuhan di tengah-tengah masyarakat untuk hidup bersama.<sup>24</sup>

Parel T. J. dan Maidiantius T. J. dalam bukunya *Politik Yesus bagi Indonesia*, mengungkapkan bahwa politik adalah bagian dari pelayanan. Istilah politik telah berkembang sangat luas, bukan hanya menyangkut pengertian harafiah, namun telah dianggap sebagai sebuah lembaga yang mengadopsi berbagai aspirasi masyarakat. Itu sebabnya disebutkan sebagai bagian dari pelayanan. Yesus telah memberikan teladan itu dengan hidup bergaul dengan para pemungut cukai. Hal ini hendak menunjukkan bahwa lingkungan apapun, termasuk dunia politik merupakan tempat untuk melayani Tuhan. Warga gereja yang menyebut dirinya murid Kristus mesti menjadikan politik sebagai dunia pelayanan. Dalam pelayanannya di dunia politik, gereja harus menghadirkan kesejahteraan. Itulah tujuan politik seperti yang telah diteladankan Yesus. Hal berikut bahwa para elite politik harus menjadi garam dan terang dunia. Garam merupakan sebuah metafora yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan fungsi orang percaya yang harus memberi makna bagi kehidupan sekitarnya. Orang percaya harus memberi pengaruh moral di tengah masyarakat, perkataan dan perbuatannya harus bisa mencegah pencemaran dalam hal moral dan spiritual. Tuhan Yesus juga mendorong setiap orang percaya untuk membawa perdamaian bagi lingkungan sekitar. Begitu pula dengan terang, makna yang sebenarnya dari menjadi terang ialah

---

<sup>24</sup> Andreas A. Yewangoe, *Panggilan Gereja/Umat Kristen di Bidang Politik*, Berita Oikumene Edisi Maret 2012. Hlm.46-48

agar semua orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Singkatnya orang lain dapat melihat Kristus melalui sikap dan perbuatan orang percaya.<sup>25</sup>

Politik pada dasarnya adalah bagian dari panggilan gereja untuk menata dunia milik Allah sebagai rumah bersama. Untuk itu gereja perlu mempersiapkan warganya agar mampu menjadi seorang birokrat yang sadar bahwa Allah memakai dirinya untuk turut serta dalam rencana keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Gereja sebagai penerus misi Kristus bagi mereka yang tersisih memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan dengan cara membangun kesadaran kritis dan menstimulasi kekuatan yang ada pada masyarakat. Tugas gereja bukan untuk mengamankan kebijakan pemerintah, tunduk tanpa kritis. Sebaliknya tugas gereja adalah untuk berada di pihak rakyat demi penyadaran dan perjuangan bersama untuk kehidupan yang bermartabat dan berkeadilan. Energi dan konsentrasi gereja harus lebih banyak diberikan kepada penguatan atau pemberdayaan masyarakat sipil.<sup>26</sup>

Gereja bukanlah perkumpulan keagamaan yang didirikan bagi tujuan kepuasan spiritual, melainkan tanda dan model dari tatanan dunia baru milik Allah, yang dibangun dalam Yesus Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus semestinya memberi sumbangsih pada tatanan sosial demokratis yang berkeadilan.<sup>27</sup> Orang Kristen Indonesia, termasuk para politisi mestinya tetap berpegang pada prinsip-prinsip kekristenan di dalam memasuki bidang politik.

---

<sup>25</sup> Parel T. J. dan Maidiantius T. J., hlm. 43-52

<sup>26</sup> Zakaria J. Ngelow dkk., hlm. 229-230

<sup>27</sup> John W. de Gruchy, *Agama Kristen dan Demokrasi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003). Hlm. 267-268

Hak-hak asasi manusia haruslah dihormati dan dijunjung tinggi. Demokrasi yang mengungkapkan kesetaraan dan kesejahteraan haruslah ditegakkan. Di manapun berada dan dalam keadaan apapun, moralitas dan etika mestinya dikedepankan. Pada akhirnya tidak boleh terlalu mudah menstigma seseorang sebagai sesat, terlebih lagi jika stigma itu membawa malapetaka bagi yang bersangkutan dan komunitasnya.<sup>28</sup>

Gereja sebagai sebuah lembaga keagamaan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan pondasi sosiologis masyarakat dan mampu menggunakan kekuatannya untuk melakukan pemberdayaan sosial. Gereja perlu memupuk nilai-nilai Kristiani, salah satunya ialah nilai tanggung jawab sehingga warga gereja siap berpartisipasi dalam membangun kehidupan bersama melalui politik.<sup>29</sup> Patuh dan membayar pajak kepada pemerintah dunia adalah kewajiban yang tidak dapat dielakkan, dan ini merupakan perintah Yesus sendiri. Setiap warga gereja harus dapat menempatkan diri, bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan firman Allah dan juga berpartisipasi secara aktif untuk menyukseskan pembangunan bangsa. Yesus berkata, “Bayarlah pajak kepada pemerintah” dan “sembahllah Tuhan dengan segenap hidupmu”. Gereja harus mampu memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran,

---

<sup>28</sup> Andreas A. Yewangoe, *Christianity and Politics Training*, (Rantepao: 17-18 Februari 2016)

<sup>29</sup> Agus Corneles T. Karundeng, *Etika Anti Korupsi: Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Kristen dalam Konteks Persoalan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Grafika Kreasindo, 2015) hlm. 70-76

keadilan, dan kekudusan dengan senantiasa berlandaskan pada firman Tuhan.<sup>30</sup>

Allah ingin menyelesaikan tujuan penebusan-Nya, agenda besar Allah, melalui gereja. Tujuan-Nya akan terpenuhi dalam masyarakat dan bangsa-bangsa jika gereja melaksanakan misinya. Gereja jauh lebih penting dalam mengubah sebuah masyarakat dibandingkan kepala negara, anggota DPR, atau para pelaku bisnis. Lembaga utama dan amat strategis yang Allah tunjuk untuk melaksanakan agenda besar-Nya tidaklah ditemukan dalam dunia politik dan ekonomi, melainkan pada gereja. Gereja melayani kepada kepala-Nya, yaitu Yesus Kristus. Gereja bekerja untuk Sang Kepala, dan agenda-Nya adalah perbaikan total.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Poltak YP Sibarani, *Bolehkah Gereja Berpolitik: Mencari Pola Hubungan Gereja dan Negara yang Relevan di Indonesia*, (Jakarta: Ramos Gospel Publishing House, 2005). Hlm. 5-11

<sup>31</sup> Bob Moffitt dan Karla Tesch, *Andaikan Yesus Kepala Daerah: Transformasi dan Gereja Lokal*, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2010) hlm. 131